

# Implementasi Pemberdayaan Umkm pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandung

Vol 5 Special Issue 3  
(December, 2021)

Saidatul Habibah<sup>1</sup>, May Riski Belina Sukoco<sup>2</sup>,  
Muhammad Kamil<sup>3\*</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas  
Muhammadiyah Malang  
Email: saidatulhabibah.sh@gmail.com<sup>1</sup>, mayriskib9@gmail.com<sup>2</sup>,  
kamil@umm.ac.id<sup>3\*</sup>

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: xxx  
Revised version received: xxx  
Accepted: xxx  
Available online: xxx

### Keywords:

Empowerment; UMKM;  
*Collaborative Government;*

### How to Cite:

APA Style 7th

## ABSTRACT

At this time we are experiencing a crucial problem, namely the COVID-19 virus pandemic. In the economic sector, this pandemic is very detrimental to business actors or MSMEs with reduced activity and economic growth which has an impact on decreasing public demand for products and services produced by MSMEs. In this case, there are a lot of MSMEs that have to close their businesses and employ employees. This research was conducted through a qualitative approach that is literature study. Based on the data that has been analyzed, there has been a drastic decline in MSMEs by more than 30%, this is due to two hindering factors, namely financial and non-financial problems which are the focus of MSME business actors. Implementation of MSME empowerment policies during the Covid-19 Pandemic can run well, as evidenced by the fulfillment of the 5 indicators of policy implementation by Merilee S. Grindle, namely the resulting benefits, expected changes, the position of policymakers, actors involved in implementing or programs, and Resources obtained. One of the policies that is very helpful in supporting the revival of MSMEs is the policy regarding the URC (UMKM Recovery Center). URC is a form of economic recovery by the City Government of Bandung, while URC is a forum for MSMEs to develop their businesses so that they can exist and be more empowered.

Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>  
Copyright (c) 2021 by IJGCS



## 1. Pendahuluan

Pada saat ini kita tengah mengalami permasalahan krusial yakni adanya pandemi virus covid-19, virus ini membawa keresahan bagi masyarakat di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Kemudian, guna mencegah situasi menjadi tidak terkontrol dan guna memutus rantai persebaran virus covid-19 maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Pemberlakuan kebijakan ini, disertai dengan penutupan banyak tempat yang ramai dikunjungi. Namun pada realitanya banyak sekali yang terdampak akibat dari kebijakan tersebut, seperti: sektor pariwisata, sektor pendidikan, serta sektor ekonomi.

Dalam sektor ekonomi, pandemic ini sangat merugikan bagi pelaku usaha atau UMKM dengan turunnya aktivitas dan pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun global yang berdampak pada turunnya permintaan masyarakat untuk produk dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM. Dalam hal ini, banyak sekali UMKM yang harus menutup usahanya serta mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa terdapat sekitar 163.713 UMKM dan 1.785 koperasi yang terdampak Covid-19 (Novika, 2020). UMKM kurang memiliki ketahanan dan fleksibilitas dalam menghadapi pandemi covid -19 ini dikarenakan tingkat digitalisasi yang masih rendah, kesulitan dalam

mengakses teknologi dan kurangnya pemahaman tentang strategi bertahan dalam masa yang sulit. UMKM berkontribusi banyak terhadap perekonomian nasional, lebih dari 99% unit usaha yang ada digolongkan sebagai UMKM dan menyumbang sekitar 61% dari PDB Indonesia serta menyediakan sebanyak 97% lapangan pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa UMKM merupakan agen yang mampu membawa perubahan secara terus-menerus pada masyarakat karena mampu membantu memajukan dan membawa inovasi serta meningkatkan kreativitas (Dhewanto et al, 2015).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Kota Bandung guna memberdayakan UMKM yang terdampak oleh pandemi Covid - 19, salah satunya dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait pemberdayaan UMKM dengan berbagai macam program. Dalam hal ini, seluruh kebijakan yang telah dikerahkan pemerintah guna tercapainya target pemberdayaan UMKM agar bisa bangkit pada masa pandemi covid-19. Dilansir dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bandung mencatat bahwasannya sekitar 88% usaha mikro tidak memiliki pemasukan KAS, dan sebanyak 60% usaha mikro kecil harus melakukan pemberhentian atau pengurangan karyawan agar dapat terus bertahan pada masa pandemi covid-19 ini. Kemudian, Satgas Pemulihan Ekonomi Kota Bandung menjelaskan bahwasannya sebanyak 120 juta orang atau 88,9% bergantung pada UKM bukan pada bisnis yang cukup besar. (Ayu, 2021) oleh sebab itu perlunya pemerintah untuk membantu UMKM agar dapat berdaya pada masa sulit seperti ini dengan menentukan target pasar yang sesuai. Dalam mewujudkan target pemberdayaan UMKM tersebut, maka dibutuhkan peran serta stakeholders dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM pada masa Pandemi Covid – 19 di Kota Bandung.

## 2. Metode

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini memberikan hasil informasi berupa catatan maupun data yang bersifat deskriptif yang tertulis di dalam teks yang diteliti. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh baik melalui data primer dan data sekunder, yang mana data tersebut didapat melalui Badan Pusat Statistik, laporan penelitian, buku, jurnal, artikel ilmiah serta beberapa website resmi pemerintahan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah bersifat studi literatur dengan menggunakan jurnal-jurnal terdahulu yang telah diteliti sebelumnya, dan literatur lainnya seperti: buku, koran, website resmi pemerintahan yang dapat menunjang penelitian ini. Analisis data yang digunakan untuk meninjau pemberdayaan UMKM pada masa pandemic covid-19, dengan adanya data tersebut kemudian akan dikumpulkan dan dapat dijadikan sebagai bahan analisa penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kondisi perekonomian di Indonesia pada masa sebelum pandemi terlihat tumbuh secara positif meski berada dalam perlambatan ekonomi secara global yang telah dipengaruhi oleh perang dagang dan geopolitik, terlihat bahwasannya Indonesia pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,02% karena terjaganya permintaan domestik, konsumsi pemerintah dan investasi, meski capaiannya bersifat rendah dibanding tahun 2018 yang sebesar 5,17%. Namun ternyata pada awal 2020, pandemi covid – 19 telah merebak di Indonesia sehingga pada triwulan pertama 2020 membuat perekonomian di Indonesia tumbuh sebesar 2,97% adanya penurunan pertumbuhan perekonomian ini telah disebabkan oleh turunnya angka permintaan secara global dan domestik yang telah di barengi dengan melemahnya harga komoditas internasional.

Tabel 1 Pertumbuhan ekonomi

Tahun	2018	2019	2020
Presentase	5,06%	5,07%	2,97%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berikut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, terlihat bahwasannya pada gambar 1 terlihat penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis jika dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 masih mencapai 5,07% hingga pada akhir 2019 adalah 4,97%. Salah satunya berdampak pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), dimana sektor UMKM merupakan tonggak perekonomian negara. Jika dilihat dari permasalahannya ada 2 aspek yang menjadi titik fokus pada dampak UMKM yaitu pada masalah non keuangan dan masalah keuangan.

Dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengupayakan berbagai kebijakan guna memulihkan kondisi perekonomian dan membantu UMKM yang terpuruk, berbagai kebijakan dikeluarkan guna memberdayakan UMKM dan untuk menilai implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di masa Pandemi Covid - 19 tersebut, peneliti menggunakan teori Merilee S. Grindle yang menilai implementasi suatu kebijakan melalui 5 variabel, diantaranya:

### **Manfaat yang dihasilkan**

Dalam hal ini, pemberdayaan UMKM pada masa pandemic covid – 19 menghasilkan beberapa manfaat, diantaranya: UMKM mampu berdiri tegak kembali di tengah wabah pandemi covid – 19 dan mampu segera menyesuaikan diri atas situasi yang ada saat ini. Pemerintah pusat maupun daerah ikut serta dalam pemberdayaan ini dan membantu UMKM untuk bangkit dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan sangat bervariasi kebijakan berupa dana bantuan, proses perizinan, webinar hingga program – program dan inovasi lainnya.

Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini membantu dalam hal membantu mempercepat produksi suatu produk, mulai dari sertifikat halal, uji mutu, *nutrition pack*, hingga kadaluarsa guna produk ini bisa dipasarkan secara langsung ke *marketplace* baik local, regional, maupun internasional. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga memberikan pelatihan *digital marketing* dan mengadakan beberapa webinar. Bahkan, pemerintah Kota Bandung juga memiliki URC (UMKM Recovery Center). URC adalah sebagai bentuk pemulihan ekonomi oleh Pemerintah Kota Bandung.

URC adalah tempat bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk – produknya. URC berada dibawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM yang terletak di Jl. Mustang. Kec. Sukajadi, Kota Bandung. URC merupakan gagasan pemerintah Kota Bandung, Perwakilan beberapa UMKM, Koperasi serta beberapa BUMN. URC juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, diantaranya: laboratorium kopi, sarana bisnis, *coaching clinic*, dengan pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM, Perbankan untuk berkonsultasi, serta beberapa pelaku usaha yang sudah sukses guna memberikan berbagai pengetahuan dan ilmu, serta terdapat showroom untuk pemasaran.

### **Perubahan yang diharapkan**

Dalam hal ini terkait sejumlah kebijakan yang dikeluarkan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat membantu UMKM dan bangkit dari keterpurukan yang ada. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai atau biasa disebut BLT. Pada tahun 2021 para pelaku UMKM bisa mendapatkan dana ini dengan cara mendaftar, bagi mereka yang pernah mendaftar diperkenankan untuk mendaftar lagi sesuai dengan PermenKopUKM No.2 Tahun 2021, jumlah dana bantuan senilai Rp 1.2 juta. Pada tahun 2021, kuotanya ada sebanyak 12.8 juta pelaku usaha.

Pandemi covid – 19 mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan akibat adanya pembatasan kegiatan, hingga kini menjadi serba online. Dalam hal ini perilaku konsumen juga berubah, konsumen lebih banyak melakukan kegiatan dirumah dan membatasi diri dengan khalayak banyak kemudian para konsumen biasanya memanfaatkan teknologi digital dengan melakukan belanja online. Perubahan juga terjadi pada strategi pelaku usaha yakni memakai peta baru dengan menerapkan 4 hal dalam bisnis mereka, yaitu: *Hygiene, Low-Touch, Less-Crowd, dan Low-Mobility*. Perubahan tersebut diharapkan agar UMKM mengatur ulang strategi mereka dan dapat

berlayar kembali lebih jauh. Adanya pandemic covid – 19 memaksa UMKM untuk memiliki strategi baru yang dapat meningkatkan minat pasar sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung saat ini agar UMKM tidak terpuruk dan tetap dapat berlayar tanpa adanya hambatan.

### **Posisi pembuat kebijakan**

Pemerintah selaku pembuat kebijakan dengan ini adalah orang yang berwenang dalam merumuskan sebuah kebijakan baru dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan saat ini. Pemerintah dalam hal ini tidak bekerja sendiri melainkan bekerjasama dengan banyak pihak dan melakukan berbagai inovasi serta program yang dapat membantu pemberdayaan UMKM di masa pandemic covid – 19.

Dalam hal ini, pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng ITB (Institut Negeri Bandung) guna mendukung program pemberdayaan UMKM. Atas Kerjasama tersebut akan dilakukan nota kesepakatan (MoU), penandatanganannya dilakukan secara *desk to desk* dan akan dirilis sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Kerjasama ini dititikberatkan pada tema kewirausahaan, meliputi: pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi dan model ekosistemnya, penciptaan dan pembinaan mahasiswa wirausaha maupun pembangunan sistem online *entrepreneur potential assessment*. Selain itu juga dilakukan kajian rencana pengembangan TIK dalam rangka mendukung basis data tunggal UMKM. Selanjutnya, juga berupa peluang Kerjasama dalam mendukung transformasi usaha informal ke formal, dukungan skema rantai pasok agar terhubung dalam *global value chain* serta sensus dan survei pendataan UMKM.

### **Aktor yang terlibat**

Pemberdayaan UMKM ini melibatkan sejumlah aktor, yakni: pemerintah pusat pemerintah daerah, civitas akademik, pelaku usaha, serta BUMN. Kerjasama ini dilakukan guna memberdayakan UMKM yang mengalami keterpurukan sehingga bisa bangkit dan berdiri kembali dengan kokoh dan tangguh sebagai wujud memerangi musuh yang ada, yakni pandemic yang terus berlangsung. Kekuatan yang dimiliki UMKM saat ini diharapkan akan terus bertambah sehingga tidak lagi goyah terhadap situasi apapun yang menanti di depan sana.

Peran Pemerintah pusat sebagai induk dari perumusan suatu kebijakan atas dasar penyelesaian masalah yang ada agar dapat menarik kembali UMKM ke masa jayanya dan kemudian peran pemerintah daerah dengan ini mendukung dan juga sebagai anak yang ikut membantu dalam merealisasikan kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut, serta membantu UMKM yang ada di daerahnya dengan mengeluarkan sejumlah program dan inovasi. Kemudian peran serta aktor lain adalah mendukung penuh pemberdayaan UMKM ini agar terealisasikan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh UMKM yang terdampak tanpa terkecuali.

### **Sumber daya yang di dapatkan**

Pemberdayaan UMKM tentu menghasilkan banyak hal sebagai bekal untuk bisa kembali bangkit di masa sekarang, baik berupa skill maupun ide dan inovasi baru yang dapat dikembangkan dan menghasilkan sebuah hal yang jauh lebih besar. Selama Pandemi Covid -19, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu dirumah dengan melakukan kegiatan alternatif seperti melukis, memasak, dan bekerja dari rumah selain itu juga masyarakat saat ini lebih senang berbelanja secara online sehingga intensitas untuk berinteraksi di luar cenderung menurun, oleh sebab itu para pelaku usaha dapat memaksimalkan perannya dan berinovasi dengan cara mengeluarkan produk yang bisa dipakai pada era sekarang.

Dalam hal itu, pelaku usaha harus bisa membaca pasar dan melakukan inovasi serta mengembangkan ide mereka agar terus diminati dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Apalagi Kota Bandung baru – baru ini kembali terpilih menjadi Kota Mode di Indonesia melalui gelaran bertajuk Fashionaxy 4.0. Menurut desainer yang terlibat dalam ajang tersebut, Lina Sukijo, Jawa Barat memiliki potensi produk kreatif yang mampu menarik konsumen untuk belanja. Hanya

saja, kesadaran masyarakat akan potensi tersebut masih minim. Untuk itu masa sekarang bisa digunakan masyarakat agar melihat kembali potensi yang dimiliki Kota Bandung dan dapat memanfaatkan hal itu dengan sebaik – baiknya.

#### 4. Kesimpulan

Dalam hal ini banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam memberdayakan UMKM, salah satunya lewat berbagai jenis kegiatan mulai dari webinar, pelatihan hingga penyediaan tempat guna menunjang berkembangnya suatu UMKM. Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pemberdayaan tidak sendiri tetapi bekerja sama baik dengan pemerintah pusat maupun lembaga – lembaga lainnya. URC (UMKM Recovery Center) adalah salah satu program dari pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk pemulihan ekonomi. URC adalah tempat bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk – produknya dan juga di dalam sana tersedia berbagai fasilitas penunjang pelaku bisnis untuk memulai maupun mengembangkan usahanya.

#### Acknowledgment

Terima kasih kami ucapkan kepada pembimbing dan seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Malang atas selesainya artikel kami, karena selama ini telah menasehati, membantu dan mengajari penulis.

#### References

- Aliyani Firdaus, S., Fadilah Ilham, I., Putri Aqidah, L., Aliyani Firdaus, S., Agung Dwi Astuti, S., & Buchori, I. (2020). Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian selama Pandemi Covid-19 pada saat New Normal. *Journal of Economics*, 5(1), 46–62. <https://doi.org/10.15642/oje.2020.5.1.46-62>
- Anjaningrum, W. D. (2020). Efektivitas Digital Marketing Dan Networks Dalam Mendongkrak Kinerja Pemasaran UKM di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Administrasi Bisnis Dan Manajemen*, 6(7), 50–61.
- Damuri, Y. R., Aswicahyono, H., Hirawan, F., Setiati, I., & Simanjuntak, I. (2020). *Langkah Pemberdayaan UMKM Dalam Menghadapi Covid - 19* (1st ed.). CSIS Indonesia.
- Desfitriana, Zufadhli, & Agustini, T. (2021). Prediction Strategi Bisnis Pada Kinerja Perusahaan Skala Kecil Menengah Masa Covid - 19. *Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(1), 168–188.
- Fuadi, D. S., Akhyadi, A. S., & Saripah, I. (2021). Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.21831/dikus.v5i1.37122>
- Hastuti, P., Nurofik, A., Purnomo, A., Hasibuan, A., Aribowo, H., Faried, A. I., Tasnim, Sudarso, A., Soetijono, I. K., Saputra, D. H., & Simarmata, J. (2020). *Kewirausahaan dan UMKM* (A. Rikki (ed.)). Yayasan Kita Menulis.
- Kurniawan, H. H., Salahuddin, A. M., Muslim, & Sri, N. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 130–139. <file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf>

- Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Journal of Economics and Business*, 5(1), 141. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317>
- Satrio, D., & Sabana, C. (2021). Pelatihan Membangun Jejaring Pemasaran Pada Masa Pandemi UMKM Kab. Batang. *Jurnal ABDIMAS*, 2(1), 6.
- Silitonga, P. (2017). *Manajemen UMKM dan Sumber Daya Manusia* (Putri Christian (ed.); 1st ed.). CV. ANDI OFFSET.
- Soleha, A. R. (2020). Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekombis*, 6(2), 165–178.
- Wuryandani, D., & Meilani, H. (2013). Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(1), 103–115.